

KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



**GERMAS**  
Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

**RENCANA STRATEGIS  
PERUBAHAN  
TAHUN 2023 - 2026**

**DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SINGKAWANG**

**Jalan Aliyang No. 7 Kota Singkawang 79123**

**Telp. (0562) 631393 Fax. (0562) 631393**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya, serta nikmat kesehatan dan keluangan waktu sehingga Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2023-2026, dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Renstra PD tahun 2023-2026 dibuat berlandaskan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Pemerintah Daerah tersebut wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026; dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 adalah untuk memberikan arah dan kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan pada Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang *sustainable* dengan menyelaraskan permasalahan kesehatan di tingkat regional, nasional dan lokal spesifik, berdasarkan isu strategis, program strategis, alokasi pendanaan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 2023-2026 berisikan rencana program dan kegiatan yang mengarah pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya di bidang kesehatan dan Keluarga Berencana yang *update* mengikuti *trend* masalah kesehatan dengan mengedepankan upaya penanganan sesuai koridor Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang kesehatan, serta diwarnai dengan kegiatan-kegiatan inovatif, kreatif dan akuntabel, sehingga upaya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dan mewujudkan generasi yang berkualitas dalam pelaksanaan perwujudan keadilan dan pemerataan di Bidang Kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Singkawang. Peran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sangat sentral sebagai Perangkat Daerah menggapai visi dan misi “Kepala Daerah Terpilih”.

Pembangunan Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, komponen masyarakat, pemangku kepentingan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersinergi dalam kerangka satu kesatuan bahwa kesehatan adalah bukan milik yang namanya Dinas Kesehatan, tetapi milik kita bersama bergerak dan melakukan sebuah upaya yang terus menerus melakukan pembenahan. Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan baik dari segi data maupun sumber daya manusianya. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang tahun 2023-2026, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Singkawang, 24 Juni 2023

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana  
Kota Singkawang





dr. Alexander, Sp. PD

PembinaTk. I

NIP.19711219 200502 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	- ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG</b> .....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang .....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang .....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana Kota Singkawang .....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga..... Kota Singkawang	29
<b>BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA KOTA SINGKAWANG</b> .....	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang .....	30
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih .....	35
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI .....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	36
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	
<b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	41
<b>BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	43
<b>BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	46
<b>BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	48
<b>BAB 8 PENUTUP</b> .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan perubahan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilandasi oleh adanya perubahan struktur pada perangkat daerah yang ada di Kota Singkawang khususnya pada Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dimekarkan menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Perubahan struktur perangkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dokumen Perubahan RPD Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Penyusunan dokumen Perubahan RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2025; Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022; RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026; Isu-isu strategis yang berkembang; Kebijakan nasional; dan Regulasi yang berlaku.

Pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Selain berpedoman pada dokumen perubahan RPD Kota Singkawang, penyusunan perubahan Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dalam periode 5

tahun terakhir. Pendekatan penyusunan perubahan Renstra juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan keterkaitannya dengan rencana-rencana strategis Dinas atau Badan terkait di tingkat Provinsi dan tingkat Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai fungsi integral di Bidang Kesehatan dan Lembaga seperti BKKBN Pusat sebagai induk dari program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah, dan juga ikut serta memperhatikan aspirasi dan masukan pemangku kepentingan pembangunan kota Singkawang.

Berbagai perubahan kebijakan diatas sangat berpengaruh pada perubahan pencapaian indikator makro dan indikator mikro serta target kinerja yang akan di capai di jajaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, melalui perubahan RENSTRA Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan diatur kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun yang pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Singkawang, maka perlu penyesuaian dalam penyusunan dokumen RENSTRA. Penyesuaian peraturan diatas dilaksanakan pada periode 2023-2026 karena sebelumnya belum dapat diakomodir. dalam penyesuaian tersebut khususnya Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016, Pasal 9 menyebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah adalah berbentuk UPT (Unit Pelaksana Tehnis) yang mana untuk melaksanakan tehnis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kemudian PERDA ini secara otomatis berubah, setelah dikeluarkannya, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Salah satu perubahan yang paling substansi adalah pasal 43, dimana pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, terdapat RSUD.

Sehubungan RSUD telah menjadi bagian dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang berbentuk Unit Bersifat khusus dimana tentang pertanggungjawaban penyampaian laporan menjadikan sajian Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan Peningkatan kualitas pada Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di RSUD.

Perubahan Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang tahun 2023-2026 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun waktu empat tahun kedepan.

## 1.2 Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
36. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
39. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5);

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang 2023-2026 adalah :

- a. Sebagai Pedoman bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama empat tahun kedepan;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam perencanaan jangka menengah;

- c. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah untuk:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dibidang urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

#### **1.4 Sistematika Penulisan.**

Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG.**

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang dan UPTDnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dan menjelaskan kinerja pelayanan Dinas kesehatan dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana.

##### **BAB 3 : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG.**

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Telaahan visi, misi, dan program RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) tahun 2005-2025. Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB 4 : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

#### **BAB 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dalam empat tahun mendatang.

#### **BAB 6 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Memuat rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Indikator kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang.

#### **BAB 8 : PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Renstra yang akan dilaksanakan selama empat tahun periode 2023-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG**

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 termaktub didalamnya bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, bermanfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta norma-norma agama, untuk itu maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana memiliki tugas dan fungsinya, agar terjadi keseimbangan dalam sebuah organisasi seperti tertera di bawah ini:

#### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.**

##### **2.1 Tugas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan peraturan Walikota Singkawang nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

##### **2.1.1 Fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor : 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang; Peraturan Walikota Singkawang Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/484/Setda.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub- Koordinator di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang terdiri dari :

## **1. Kepala Dinas.**

Tugas Pokok : Memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas kepala dinas mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Penyelenggaraan program kerja di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan sumber daya manusia kesehatan, pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit, pembinaan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta pembinaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencanan yang diberikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dibantu oleh :

## **2. Sekretariat Dinas.**

Tugas pokok : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan dinas;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh kepala dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat, terdiri dari : Sekretaris di bantu oleh 2 Subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

### **3. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.**

Tugas Pokok : Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan masyarakat dan sumber daya manusia kesehatan meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya kesehatan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya manusia kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian, terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya manusia kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya manusia kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya manusia kesehatan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, serta sumber daya manusia; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.**

Tugas pokok : Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta pencegahan, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian.**

Tugas pokok : Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian meliputi pelayanan kesehatan, kefarmasian, pengendalian makanan dan minuman, serta alat, sarana dan prasarana kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, pengendalian makanan dan minuman, serta alat, sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, pengendalian makanan dan minuman, serta alat, sarana dan prasarana kesehatan;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, pengendalian makanan dan minuman, serta alat, sarana dan prasarana kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pengekoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, pengendalian makanan dan minuman, serta alat, sarana dan prasarana kesehatan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, pengendalian makanan dan minuman, serta alat, sarana dan prasarana kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, pengendalian makanan dan minuman, serta alat, sarana dan prasarana kesehatan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian, pengendalian makanan dan minuman, serta alat, sarana dan prasarana kesehatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**

Tugas pokok : Menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera serta keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, serta keluarga berencana;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, serta keluarga berencana;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, serta keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengekoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, serta keluarga berencana;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, serta keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, serta keluarga berencana;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, serta keluarga berencana; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **7. Kelompok jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan**

melaksanakan tugas dan fungsi jabatan administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator. Dalam masa transisi, perangkat daerah yang melakukan penyetaraan dan/atau penghapusan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dapat ditetapkan koordinator dan atau sub koordinator kelompok jabatan fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang di pimpin oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koordinator dan/atau sub koordinator jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **8. Unit Pelaksana Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Salah satu perubahan yang paling substansi adalah pasal 43, dimana pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, terdapat rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional. Rumah Sakit Umum Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, dan dipimpin oleh direktur. Dalam melaksanakan ketentuan, direktur rumah sakit Daerah diteapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.

Direktur rumah sakit Daerah memiliki tugas dan kewenangan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menandatangani surat perintah membayar;
- d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;

- f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
- g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran disampaikan ke tim anggaran melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur rumah sakit Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Otonomi dalam bidang kepegawaian dilaksanakan melalui ketentuan sebagai berikut :

- a. direktur rumah sakit Daerah dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur, sipil negara kepada pejabat yang berwenang;
- b. direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan kepegawaian aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan;
- c. direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah;

#### **9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)**

Menurut peraturan Walikota Singkawang nomor 39 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat berdasarkan rencana strategis Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. Pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. Penyusunan rencana dan program kegiatan upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama;
- c. Penyelenggaraan UKM esensial meliputi pelayanan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, pelayanan gizi dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal;
- d. Penyelenggaraan UKM pengembangan meliputi upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya

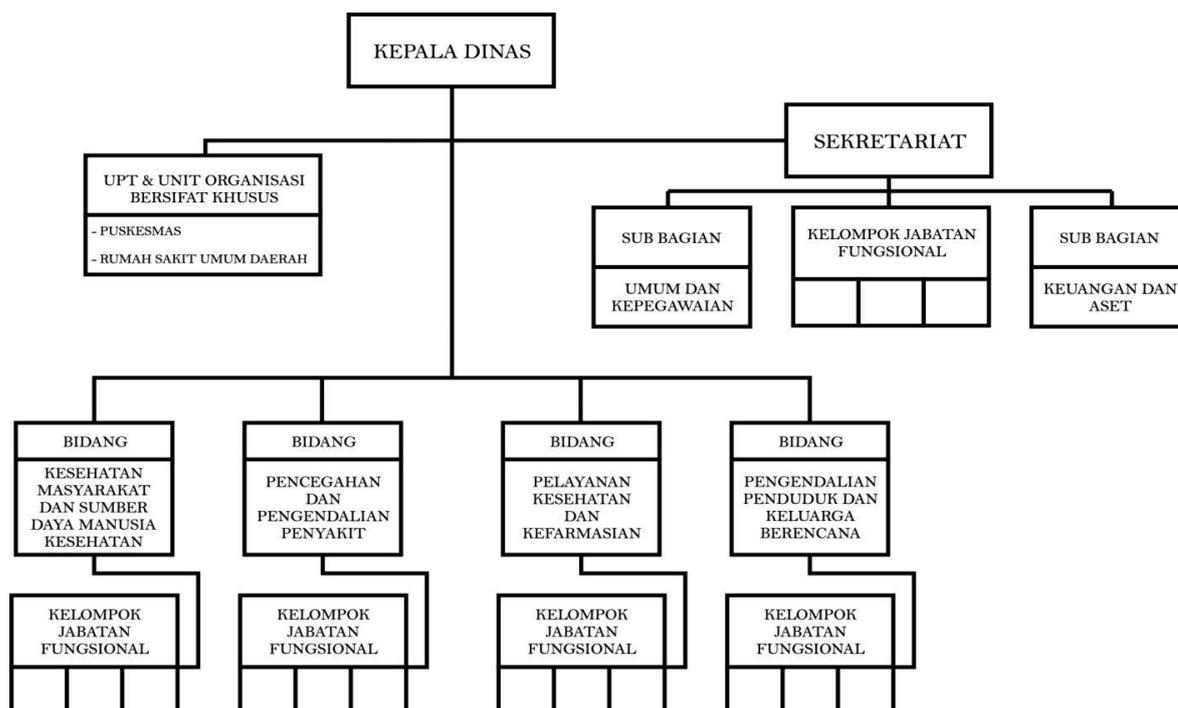
- kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, upaya pembinaan pengobatan tradisional, upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama yaitu pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari (*one day care*), *home care* dan/atau rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan;
  - f. Pengoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas pembantu di wilayah kerjanya;
  - g. Pembinaan kepada Puskesmas pembantu di wilayah kerjanya;
  - h. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang terdiri dari:

- (1) Puskesmas Singkawang Tengah I;
- (2) Puskesmas Singkawang Tengah II;
- (3) Puskesmas Singkawang Barat I;
- (4) Puskesmas Singkawang Barat II;
- (5) Puskesmas Singkawang Selatan I;
- (6) Puskesmas Singkawang Selatan II;
- (7) Puskesmas Singkawang Utara I;
- (8) Puskesmas Singkawang Utara II;
- (9) Puskesmas Singkawang Timur I; dan
- (10) Puskesmas Singkawang Timur II.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SINGKAWANG**

**Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.**



**2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.**

**2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.**

Sumber Daya Aparatur (SDA) yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dan Unit Organisasi bersifat khusus yaitu RSUD sampai dengan Desember 2021 dapat dilihat rincian tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.1.1  
Data SDA di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana  
Kota Singkawang**

NO	URAIAN	PEGAWAI		Jumlah (orang)
		PNS	NON PNS	
1	Dinkes dan KB	54	15	69
2	UPT. Puskesmas	421	83	504
3	RSUD	363	385	748
	<b>Jumlah</b>	<b>838</b>	<b>483</b>	<b>1321</b>

Sumber : Data olahan Perencana pada Dinas Kesehatan dan KB

Sumber Daya Aparatur pada Dinas kesehatan dan Keluarga Berencana serta UPT dan Unit organisasi bersifat khusus (RSUD) memiliki rasio 2:1 antara PNS dan Non PNS, ini menandakan bahwa masih terdapat kendala yang besar apabila diberlakukan pemberhentian tenaga honorer (Non PNS) pada jajaran Kesehatan. Upaya penghapusan Non PNS akan berdampak pada pelayanan kesehatan khususnya pada sentra-sentra pelayanan seperti UPT nya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yakni Puskesmas dan unit organisasi bersifat khusus yaitu RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah).

Upaya agar tenaga Non PNS yang ada lebih baik ditingkatkan statusnya ke tingkat yang lebih resmi sesuai dengan regulasi yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibuat, adalah langkah yang bijak untuk dilakukan, agar tidak terjadi permasalahan ketimpangan layanan kesehatan di pusat-pusat layanan kesehatan baik dasar maupun rujukan. Hal ini menandakan bahwa keberpihakan pemerintah untuk mengakomodir tenaga Non PNS dapat diselesaikan dengan bijaksana.

**Tabel 2.2.1.2**  
**Data SDA di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**  
**Kota Singkawang berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
		S3/SUB SPELIALIS	S2	S1	D4	D3	D2/1	SLTA	SLTP	SD	
1	Dinkes dan KB		8	35	0	10	1	15	0	0	69
2	UPT. Puskesmas	0	5	100	342				52	2	504
3	RSUD	2	26	163	39	356	2	143	12	6	748
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>263</b>	<b>748</b>		<b>2</b>	<b>159</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>1321</b>

Sumber : Data olahan Perencana pada Dinas Kesehatan dan KB.

Kapasitas dan kualitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan aparatur Kesehatan pada jajaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang paling banyak adalah pendidikan pada Jenjang Diploma (3,4) sebanyak 748 orang, disusul dengan jenjang tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 263 orang. Menariknya Kota Singkawang memiliki 2 Dokter Sub Spesialis yang biasanya berada di Ibukota Provinsi, tetapi Singkawang memilikinya, inilah yang harus di pertahankan dan dibina agar Singkawang lebih berkembang kedepannya, khususnya pada sub spesialisasi yang

ada, bila perlu ditingkatkan kembali pada berbagai subspecialisasi lainnya, sehingga masyarakat Kota Singkawang tidak perlu jauh-jauh merujuk atau mencari pertolongan jika membutuhkan pertolongan sub spesialisasi.

Dari segi kuantitas, jenjang Diploma 3 dan 4 lebih mendominasi tingkat pendidikan tenaga kesehatan yang bekerja di Institusi milik Pemerintah Kota Singkawang, disusul Strata 1, dan SLTA. Dengan rata-rata tingkat pendidikan aparatur Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana beserta UPT-nya dan unit organisasi khusus yang ada, relatif masih lebih banyak lulusan Diploma, menandakan ini adalah peluang yang cukup besar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di UKP dan UKM, di seluruh Wilayah Kota Singkawang.

**Tabel 2.2.1.3**

**Data SDA Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang berdasarkan Golongan**

NO	URAIAN	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Dinkes dan KB	7	40	7	0	54
2	UPT. Puskesmas	25	312	83	1	421
3	RSUD	40	241	78	5	364
	<b>Jumlah</b>	<b>72</b>	<b>566</b>	<b>168</b>	<b>6</b>	<b>839</b>

Sumber : Data olahan Perencana pada Dinas Kesehatan dan KB

Sebagai lembaga yang bergerak dalam urusan kesehatan masyarakat Kota Singkawang, tingkat pendidikan diatas tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagai lembaga kesehatan secara optimal. Kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat struktural dan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.

Sekalipun kebijakan internal Pemerintah Kota telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional tertentu, namun perlu di petakan kebutuhan sesungguhnya guna menyelesaikan permasalahan pekerjaan yang ada di institusi Kesehatan di Kota Singkawang, disamping tawaran- tawaran pada jenjang fungsional yang ada belum dapat menarik minat ASN untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional tertentu.

## 2.2.2 Sumber Daya Keuangan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Sumber Daya Keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang tahun 2023-2026. Diperoleh dari beberapa sumber pembiayaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2.2.1**  
**Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang Tahun 2018 – 2022**

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2018	70.446.304.620	63.019.821.715	89,46%
2	2019	80.565.997.858	72.715.489.708	90,26%
3	2020	90.501.663.387	76.849.321.769	84,91%
4	2021	102.934.967.648	84.521.724.293	82,11%
5	2022	96.131.133.109	86.870.445.000	90,37%
	<b>Jumlah</b>	<b>440.580.066.622</b>	<b>383.976.802.485</b>	<b>87,15%</b>

Sumber : Subbag Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

**Tabel 2.2.2.2**  
**Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022**

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2018	128.124.432.641	97.442.933.709	76,05%
2	2019	162.533.572.449	133.670.947.469	82,24%
3	2020	137.474.418.040	119.410.634.804	86,86%
4	2021	168.473.164.512	154.556.907.178	91,74%
5	2022	157.449.803.651	150.773.937.551	95,76%
	<b>Jumlah</b>	<b>754.055.391.293</b>	<b>655.855.360.711</b>	<b>86,98%</b>

Sumber : Subbag Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Azis Kota Singkawang.

Peningkatan alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena adanya beberapa kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Pada tahun 2020 awal sampai dengan tahun 2022 awal juga, pandemi kasus Covid-19 masih

menjadi kendala, berulang kali pemerintah Kota Singkawang melakukan *refocusing* anggaran guna mengantisipasi dan menekan penyebaran covid-19, hal ini berimbas pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sedikit terkendala. Untuk itu kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang memiliki sarana/prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas sendiri maupun operasional UPT dan unit organisasi bersifat khusus, baik yang ada di Puskesmas maupun di RSUD. Sarana dan Prasarana tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan Kesehatan dasar maupun lanjutan. Adapun data sarana dan Prasarana pada lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kota Singkawang sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut ;

NO	UNIT	JUMLAH	KETERANGAN
<b>A. Dinas Kesehatan dan Jaringannya</b>			
1	Gedung Dinas Kesehatan & KB	1	Unit
2	Gedung Instalasi Perbekalan Kesehatan (IPK)	1	Unit
3	Gedung Puskesmas	10	Unit
4	Gedung Puskesmas Pembantu	18	Unit
5	Pos Kesehatan Kelurahan	19	Unit
6	Rumah Dinas Dokter	17	Unit
7	Rumah Dinas Para Medis	41	Unit
8	Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)	5	Unit
9	Kendaraan Roda 4	20	Unit
10	Kendaraan roda 4 Pusling	9	Unit
11	Kendaraan roda 2 di Dinkes dan KB	85	Unit
12	Kendaraan roda 2 di Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes	130	Unit
<b>B. RSUD. Abdul Azis</b>			
1	Gedung Administrasi/Manajemen	1	Unit
2	Gedung IGD	1	Unit
3	Gedung Instalasi Farmasi	1	Unit
4	Gedung Rawat Jalan	1	Unit
5	Gedung Instalasi Laboratorium	1	Unit
6	Gedung Instalasi Radiologi	1	Unit
7	Gedung Perawatan Penyakit Dalam	1	Unit

8	Gedung Perawatan Penyakit Anak	1	Unit
9	Gedung Perawatan Bedah	1	Unit
10	Gedung Perawatan Kebidanan	1	Unit
11	Gedung Perawatan Perinatologi	1	Unit
12	Gedung Instalasi Bedah Central	1	Unit
13	Gedung Perawatan KLS I	1	Unit
14	Gedung/Ruang Perawatan Isolasi	1	Unit
15	Gedung Instalasi Gizi	1	Unit
16	Gedung Laundry	1	Unit
17	Gedung IPSRS	1	Unit
18	Gedung Kamar Jenazah	1	Unit
19	Gedung Penampungan Limbah	1	Unit
20	Gedung Insenerator	1	Unit
21	Gedung Boiler	1	Unit
22	Gedung CSSD	1	Unit
23	Gedung Generator Set	1	Unit
24	Gedung Operator Pengolahan Limbah	1	Unit
25	Gedung HAemodialisa	1	Unit
26	Gedung Perawatan ICU/ ICCU		Unit
27	Gedung Perawatan VIP	1	Unit
28	Gedung Jemur Cucian	1	Unit
29	Gedung Metadon	1	Unit
30	Gedung BDRS (Bank Darah RS)	1	Unit
31	Gedung Pos Penjaga keamanan	1	Unit
32	Garasi / tempat parker	1	Unit
33	Gedung CT Scan	1	Unit
34	Gedung pelayanan Penunjang medis (Fisioterapi)	1	Unit
35	Ruang Sputum	1	Unit
36	Jaringan perpipaan gas medis	1	Unit
37	Selasar penghubung bagian belakang gedung poliklinik	1	Unit
38	Gedung komite, Dewas & SPI	1	Unit
39	Gudang barang	1	Unit
40	Gedung Mikrobiologi	1	Unit
41	Pos satpam gedung radiologi Baru	1	Unit

42	Garasi gedung fisioterapy	1	Unit
43	Pintu air	3	Unit
44	Gedung Apotek Rawat Inap	1	Unit
45	Jaringan gas medis	1	Unit
46	Pos sentral air	1	Unit
47	Gedung klinik mawar dan methadon	1	Unit
48	Gedung Verifikasi Klaim dan pendapatan	1	Unit
49	Gedung masjid	1	Unit
50	Gedung stabilizer	1	Unit
51	Gedung Pavilliun (VVIP)	1	Unit
52	Gedung UPS	1	Unit
53	Jaringan Gas Medis Ruang ICU Baru	1	Unit
54	Kendaraan Roda 4 (Mobil dinas Dokter Spesialis dan Direktur)	4 0	Unit
55	Kendaraan Roda 2	6	Unit
56	Kendaraan Roda 4 (Ambulance)	6	Unit
57	Rumah Dinas Dokter Spesialis	6	Unit
58	Rumah Dinas Pegawai	1	Unit
59	Asrama/Mess	1	Unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Singkawang yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan. Adapun Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan yang menjadi Target dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dan telah dipetakan masalah serta menyelesaikan masalah yang ditentukan dari faktor penentu keberhasilan dapat dilihat pada table T-C 2.3 dibawah ini :

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, terdapat 45 Indikator Outcome Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan ditambah 10 Indikator Outcome bersumber dari penambahan yang melekat pada RPJMD Kota Singkawang dan 31 Indikator Outcome pencapaian pelayanan pada Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Total Keseluruhan Indikator yang menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah sebanyak 81 (delapan puluh satu) Indikator outcome sebagai evaluasi bagi capaian kinerja pada tahun 2018 sampai dengan 2022.

Analisis kesesuaian target dan realisasi terhadap capaian yang diperoleh dari seluruh Bidang pengampuh indikator yang termaktub dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, hanya berkisar 30 indikator dari 55 indikator yang disajikan. Hal ini menandakan bahwa 25 indikator tidak relevan atau sudah ada perubahan definisi operasional indikator yang dikelola pada tataran pengampuh bidang yang lebih tinggi yakni Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indikator yang sudah tidak relevan khususnya banyak dijumpai pada bidang P2 (Penanggulangan Penyakit).

Target pelayanan kesehatan pada bayi dan balita belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam 5 tahun belakangan, cenderung fluktuatif dan masih menyisakan berbagai problematik. Target Angka Kematian Bayi pada RPJMD Kota Singkawang yakni sebesar 7,58 (pada awal tahun 2017) dan akhir tahun 2022, mencapai angka sebesar 8,37. Dari angka diatas belum bisa menekan angka kematian pada bayi. Angka kematian balita mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan keadaan pada angka kematian bayi. Untuk angka kematian balita pada RPJMD kota Singkawang target yang ditetapkan sebesar 1,64. Capaian akhir 2022 mencapai 1,49 dapat ditekan meskipun sedikit. Kasus kematian terbanyak pada bayi adalah oleh BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) disebabkan asupan gizi selama kehamilan yang kurang memadai.

Angka kematian ibu yang ditetapkan pada awal RPJMD Kota Singkawang tahun 2017 sebesar 118,37/100.000 KH. Capaian akhir RENSTRA Dinas kesehatan tahun 2022 yaitu 111,60/100.000 KH. Dari sisi capaian maka mengalami peningkatan capaian, tetapi perlu di analisa kembali bahwa Angka Kematian Ibu di Kota Singkawan, masih menjadi pembahasan, apakah relevan untuk menyajikan data dimaksud, karena belum pernah sejak berdirinya kota Singkawang merilis angka kematian ibu. Sedangkan untuk melihat kematian ibu hanya bisa dilihat dari kasus dan sebab kematiannya yang terdiri dari 2 kasus kematian ibu hamil dengan diagnosa terkonfirmasi covid 19 dan 1 kasus kematian ibu nifas komplikasi pasca covid 19 (long covid 19) dari 6 kasus kematian yang ditemukan.

Untuk standar pelayanan kesehatan pada ibu hamil dapat dilihat dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan. Target awal adalah sebesar 88,59%. Kondisi akhir 2022 berada pada angka 72,45%. Menandakan bahwa capaian pelayanan kesehatan pada ibu hamil masih jauh dari harapan. Pencapaian diatas yang jauh dari target berdasarkan informasi dari pemegang program lebih pada penetapan sasaran yang berbeda jauh dengan data riil yang dimiliki oleh masing-masing penanggungjawab program pada kesehatan ibu dan anak.

Program pencegahan penyakit, Dinas kesehatan dan KB melakukan upaya seperti Desa/Kelurahan UCI, Imunisasi Campak, Imunisasi Polio, dan Vaksinasi Covid-19, disamping program imunisasi lainnya. Imunisasi Campak mengalami penurunan capaian dari target RPJMD. Pada tahun 2022 capaian imunisasi Campak sebesar 35,50%, dari target yang harus dicapai sebesar 74,4%. Berdasarkan capaian imunisasi Campak tentunya menjadi perhatian besar bagi program untuk meningkatkan capaian. Ditemuinya suspec kasus polio sebanyak 2 kasus pada tahun 2022, memberi sinyal perlunya dikuatkan sistem surveilans yang baik, sehingga penyakit-penyakit yang mulai muncul dapat dipantau sedini mungkin.

Upaya Vaksinasi Covid-19 yang *Sustainable* sampai dinyatakan Singkawang bebas dari penyebaran Covid-19. Pada tahun 2021 Persentase Vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 71,07%, dan telah melebihi target Nasional yakni mencapai 70%. Dosis 2 masih sebesar 56,52%, dosis 3 (booster) 1,23%. Kelompok umur lansia menjadi dasar terkendalanya di lapangan dalam upaya pemenuhan cakupan vaksin Covid-19 disamping terdapatnya juga masyarakat sebagian kecil yang anti vaksin, Untuk itu diperlukan upaya kerjasama lintas sektor, melakukan vaksinasi *door to door* melakukan pendekatan pada kelompok yang rentan tersebut.

Rasio fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk wilayah Kota Singkawang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Peningkatan kuantitas baik sarana dan prasarana serta SDM Kesehatan, harus sejalan dengan peningkatan kualitas dari sarana dan prasarana pendukung di bidang kesehatan dan SDM Kesehatannya, dengan demikian kebutuhan akan *supply* dan *demand* terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi, dan bermuara kepada tujuan yakni terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang optimal.

Indikator yang menjadi bahan evaluasi pada program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, ada sebanyak 31 indikator, dan sebagian besar hasil capaian didapat dari data sekunder yakni rilis BPS maupun BKKBN sebagai organisasi induk bagi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Selebihnya pengelola program tidak dapat menyajikan data, akibat lemahnya kesadaran dan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk menganalisis, dan mamahami antara tujuan yang telah disajikan dalam bentuk target indikator, dengan kegiatan yang melekat guna mencapai tujuan.

Kurangnya evaluasi dari top manajer menjadikan hal ini berlanjut, sehingga berdampak pada kinerja yang dilaksanakan pada bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana hanya berkuat kepada capaian realisasi anggaran kegiatan tanpa memperhitungkan hasil outcome yang telah dituntun sesuai dengan regulasi diatas.

Kegiatan Percepatan Penanganan Stunting di Kalimantan Barat khususnya Kota Singkawang, dimana Bidang Dalduk dan KB adalah salah satu Bidang yang konsen terhadap upaya Spesifik menjadikan salah satu faktor penunjang lemahnya penyajian hasil data yang diharapkan, disamping kurangnya kuantitas dari SDM yang ada di Bidang Dalduk dan KB.

#### **Tabel T-C. 24**

#### **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2018-2022**

Anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang termasuk didalamnya Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Azis dari tahun ke tahun menunjukkan trend kearah peningkatan alokasi. Hal ini mengindikasikan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk memenuhi 10% alokasi di sektor kesehatan terhadap APBD Kota Singkawang.

Pada tahun 2022 rasio realisasi anggaran terhadap pagu anggaran mengalami peningkatan mencapai sebesar 93,72%, yang tahun-tahun sebelumnya masih dikisaran dibawah 90%. Program yang berkaitan langsung pada Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Upaya Kesehatan Perorangan adalah salah satu program yang banyak melakukan perbaikan, baik itu tingkat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Azis maupun Puskesmas yang tersebar di seluruh Wilayah Kota Singkawang. Perbaikan yang tampak pada tataran RSUD. Azis adalah dengan mendapatkan Akreditasi Paripurna Bintang V. Sedangkan pada tataran Puskesmas dimana pada tahun 2022, manajemen pengelolaan keuangan Puskesmas seluruhnya sudah menerapkan manajemen BLUD, dengan harapan pengelolaan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan belanja penunjang pelayanan kesehatan tidak lagi menjadi kendala.

Permasalahan yang sebenarnya terjadi pada program yakni adanya 2 (dua) sumber data sasaran yang dipakai oleh program di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, yaitu data yang berasal dari angka proyeksi yang dikeluarkan oleh insititusi induk yakni Kementrian Kesehatan RI, atau Pusdatin Kemenkes Republik Indonesia, dan diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan Provinsi meneruskan kembali sampai Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kedua adalah data yang bersumber dari Wilayah setempat, biasanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang berupa data Agregat dan biasanya dikelaurkan pada akhir tahun. Perumusan data capaian target diatas merupakan cakupan hasil yang dilakukan berdasarkan hitungan program, tetapi jika di analisa berdasarkan Penetapan target kinerja 2018-2022 berupa angka disadari bukan merupakan bagian kinerja dari Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, melainkan target dari pimpinan yang lebih tinggi, yakni setingkat Walikota maupun Gubernur karena cakupan yang bisa dilakukan pada tataran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah sifatnya atau jangkauannya tehnis layanan capaian saja. Pencapaian dalam bentuk angka hanya bisa dihitung berdasarkan keluaran dari institusi seperti Badan Pusat Statistik, maupun dalam bentuk survey yang dilakukan oleh institusi pelaksana survey seperti Pusdatin yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan metode-metode atau pun langkah-langkah ilmiah dalam sebuah survey.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan.

Era teknologi informasi dan globalisasi serta persaingan perdagangan global khususnya di Bidang kesehatan begitu nyata. Apabila institusi pelayanan kesehatan tidak sadar dan berbenah, maka bukan tidak mungkin pelayanan kesehatan yang menerapkan manajemen yang monoton akan tergilas dengan manajemen inovatif, konstruktif dan modern.

Pelayanan kesehatan dengan sajian berkelas akan menjadi tujuan masyarakat untuk beralih ke mereka yang menawarkan program-program pelayanan kesehatan dengan pola pelayanan sekelas hotel ber bintang dengan tarif ekonomis, hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi perhatian kedepan, Bagi Pengembangan RSUD. Abdul Azis agar bisa bersaing dengan tawaran-tawaran layanan kesehatan yang ada di negara tetangga kita, apalagi wilayah geografis Kota Singkawang sangat rentan, untuk dimasuki pelayanan kesehatan dari negara luar, karena hanya berbatasan darat dengan negara tetangga, Malaysia.

Singkawang telah dikenal luas, merupakan daerah destinasi wisata domestik maupun mancanegara, ini menjadi peluang bagi Kota Singkawang untuk mengembangkan produk-produk layanan kesehatannya, program *health Tourism* menjadi salah satu program unggulan yang akan dikembangkan, karena tidak perlu upaya keras dalam menjual produk- produk, khususnya produk pelayanan kesehatan. Untuk itu penyediaan layanan kesehatan yang berstandar internasional sudah menjadi kerangka konstruktif bagi perencanaan pembangunan pelayanan kesehatan lanjutan, dimulai dari penyediaan alat kesehatan yang sudah berstandar internasional sampai pada penyediaan obat-obatan yang dikemas dengan sistem yang modern. Pemanfaatan tata ruang harus benar-benar diatur, sehingga kondisi lingkungan yang baik dan tidak terdapat pemukiman kumuh sebagai sumber dari berbagai sumber penyakit menular dapat diputus mata rantainya.

Masyarakat telah cerdas merasakan dan memilah, serta pada akhirnya memilih pelayanan kesehatan yang berkualitas, untuk menuju pelayanan yang berkelas dan berkualitas, maka penguatan manajemen tatakelola manajemen essential dan rujukan mutu mutlak menjadi prioritas untuk dilakukan kedepannya, penyediaan dokter spesialisik maupun sub spesialisik akan memperkuat sistem rujukan di daerah. Agar sistem ini berjalan maka pola BLUD pada institusi pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, menjadi acuan agar manajemen lebih fleksibel menggunakan kebijakan anggarannya menuju *public private*.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG**

Derajat kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi era globalisasi. Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah.

Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat yang membutuhkan kualitas dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada empat tahun mendatang.

Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Konsep penanganan kesehatan secara promotive dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.**

Berdasarkan Aspek pelayanan umum dalam Bidang Kesehatan pada pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dilihat dari prioritas yang harus diselesaikan pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Singkawang, hingga Desember 2021, Covid-19 masih berfluktuatif dan menandakan bahwa Wabah Covid-19 tetap menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Pasien terkonfirmasi Positif berdasarkan data per 31 Desember

2021 ada sebanyak 6668 kasus, dengan jumlah yang meninggal sebanyak 135 orang.

2. Rentannya kasus Covid-19 menyebar kembali, sehingga dibutuhkan upaya Vaksinasi Covid-19 yang *Sustainable* sampai dinyatakan Singkawang bebas dari penyebaran Covid-19. Pada tahun 2021 Persentase Vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 71,07%, dan telah melebihi target Nasional yakni mencapai 70%. Dosis 2 masih sebesar 56,52%, dosis 3 (booster) 1,23%. Kelompok umur lansia menjadi dasar terkendalanya di lapangan dalam upaya pemenuhan cakupan vaksin Covid-19 disamping terdapatnya juga masyarakat sebagian kecil yang anti vaksin, Untuk itu diperlukan upaya kerjasama lintas sektor, melakukan vaksinasi *door to door* melakukan pendekatan pada mereka.

3. Masih tingginya kasus kematian ibu Melahirkan.

Kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021 berjumlah 6 orang, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki 4 kasus kematian pada ibu melahirkan. Kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2021 sebanyak 2 orang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19, dan 2 lagi adanya penyakit penyerta seperti penyakit Jantung dll. Melihat faktor penyebab kematian ibu yang akan melahirkan tersebut, diperlukan upaya peningkatan advokasi dan edukasi pola-pola protokol kesehatan pencegahan terkonfirmasi Covid-19 pada ibu yang akan melahirkan, serta menjaga vitalitas ibu agar penyakit-penyakit penyerta seperti Jantung dan lainnya dapat di hindari dan di kendalikan.

4. Tingginya Angka Stunting Pada Balita.

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang bersumber dari Litbang Kementerian Kesehatan RI Bahwa Kota Singkawang memiliki 22,03% Balita dengan keadaan Stunting. Hal ini sangat berbeda jauh dari hasil Fasitiy Based yang didapat dari sumber laporan yang masuk dan diolah pada Seksi Kesehatan Gizi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, dimana terdapat data sebesar 11,33% Balita dengan Stunting. Berdasarkan analisa diatas masih dibutuhkan kembali upaya pencarian Balita di Wilayah Kerja Kota Singkawang, karena Balita yang di lakukan pengukuran tidak menyentuh pada balita sebenarnya yang mengalami permasalahan stunting yaitu berjumlah sekitar 4.351 balita dari Jumlah Sasaran Balita 19.789 Balita. Sedangkan data SSGI yakni dilakukan pengukuran kepada 4.388 Balita se-Kota Singkawang, yang baru ditimbang. Beberapa hal yang masih mempengaruhi masalah gizi, disebabkan karena terlambatnya penemuan kasus pada bayi yang beresiko Stunting, rendahnya monitoring dan evaluasi, rendahnya pengetahuan orang tua dalam menemukan tanda-tanda gizi buruk, kurangnya kepatuhan orang tua dalam mengikuti proses perawatan, kurang

pengetahuan ibu dalam mengolah makanan bayi dalam rangka proses pemulihan, dan penanganan lanjutan kasus gizi buruk belum optimal. Sementara Prevalensi Stunting kota Singkawang berdasarkan data SSGI terus saja meningkat yaitu sebesar 22,03% lebih rendah dari standar nasional sebesar 24,1%.

5. Belum optimalnya Imunisasi.

Imunisasi pada kota Singkawang sampai dengan tahun 2020 khususnya pada bayi belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat dari cakupan kelurahan UCI (universal child immunization) dimana sampai dengan tahun 2020 hanya mencapai 19,23% dari 80% yang ditargetkan, yaitu hanya ada 5 kelurahan dari 26 kelurahan di Kota Singkawang. Sedangkan di Tahun 2021 ada penambahan 2 Kelurahan lagi yang sudah memiliki cakupan kelurahan yang sudah UCI. Persentase kelurahan yang mencapai UCI ada penambahan 7,69%. Sehingga persentase kumulatif kelurahan yang UCI sejak 2020 sampai dengan tahun 2021 adalah 26,92%, masih jauh dari target Nasional sebesar 80%.

6. Munculnya kembali penyakit menular yang sudah dianggap dapat diselesaikan, tetapi ternyata merebak kembali, seperti penyakit Difteri. Penyakit Difteri merebak di Singkawang dengan penemuan sebanyak 25 kasus sampai akhir tahun 2021, dengan kematian sebanyak 2 orang. Kemenkes langsung merespon dengan mengeluarkan status Kota Singkawang dalam keadaan KLB Difteri dan kejadian tersebut langsung di respon oleh Walikota dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443/1332/Dinkes Dinas KB/P2P/A tentang Pencegahan dan Pengendalian penyakit Difteri di Kota Singkawang, setelah keluarnya instruksi Walikota maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana langsung melakukan ORI (Outbreak Response Immunization) yakni imunisasi tambahan yang khusus diberikan di daerah yang mengalami KLB dan di lakukan sebanyak 3 kali untuk membentuk kekebalan tubuh. KLB difteri dapat dikendalikan dengan kerjasama dan partisipasi semua orang, terutama orang tua yang mempunyai anak agar berupaya tanggap dan berpartisipasi memutus mata rantai dengan melakukan imunisasi sebanyak 3 kali.

7. Belum optimalnya Manajemen perencanaan kesehatan.

Kurangnya dukungan data yang memadai dari berbagai bidang sehingga membuat kegiatan perencanaan terhambat, Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan masih kurangnya ketersediaan data yang akurat dan valid sehingga kurang optimalnya penerapan perencanaan. Ketersedian e-Puskesmas diharapkan menjadi solusi kedepan bagi terwujudnya integrasi data yang baik di Jajaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

8. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan kesehatan. Sarana dan Prasarana Puskesmas belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan standar. Baru 1 Puskesmas, yaitu Puskesmas Singkawang Timur 1 yang telah diupayakan sesuai dengan aturan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. Begitu juga dengan RSUD, perlu dilakukan upaya agar RSUD Kota Singkawang di persiapkan menjadi RS dengan fasilitas bertaraf Internasional.
9. Belum adanya *Blue Print atau road Map* Pembangunan Kependudukan. Pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila memiliki penduduk yang menjadi modal dasar pembangunan. Kondisi yang kondusif dan konstruktif, yang bukan saja dari sisi jumlah yang mencukupi struktur masyarakat tetapi persebarannya juga harus menguntungkan dan memadai. Jumlah penduduk besar tapi kualitas rendah tidak akan dapat memberikan dukungan positif pada pembangunan justru akan menjadi beban pembangunan. Bukan tidak mungkin apabila jumlah penduduk tidak dapat ditekan pertumbuhannya maka hasil-hasil pembangunan akan menjadi sia-sia.
10. Belum optimalnya Cakupan peserta KB Aktif. Jumlah peserta KB Aktif pada Tahun 2021 yang dilaporkan sebanyak 62.174 akseptor, dari 85.753 PUS yang ada di Kota Singkawang, sehingga cakupan KB Aktif sebesar 72,50%, turun dari capaian KB Aktif pada tahun 2020 yang mencapai 73,75% dari 75% target. Hal ini disebabkan jumlah tenaga penyuluh KB yang masih kurang pada setiap kelurahan dimana idealnya setiap kelurahan memiliki minimal 2 tenaga penyuluh KB. Selain itu Masih rendahnya kesadaran pasangan usia subur (PUS) untuk mengikuti KB yakni hanya 23.579 dari 85.750 PUS.

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kota Singkawang dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas dengan berupaya melakukan pembenahan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada UKP dan UKM yang tersebar di Kota Singkawang.

Tabel T-B 3.5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan pada UKP dan UKM	Tingginya Kasus Positif Covid-19	<input type="checkbox"/> Rendahnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat. Prilaku yang menggunakan Protokol Kesehatan Masyarakat perlu di tingkatkan
		Rentannya masyarakat terpapar Covid-19	<input type="checkbox"/> Masih kurangnya capaian Vaksinasi di masyarakat. <input type="checkbox"/> Adanya sekelompok orang yang anti terhadap vaksin
		Tingginya kasus kematian ibu melahirkan	<input type="checkbox"/> Kurangnya pengetahuan ibu bersalin untuk menjaga agar tidak tertular dengan penyakit penyerta yang rentan terjadi pada ibu bersalin.
		Tingginya kasus Stunting Pada Balita	<input type="checkbox"/> Rendahnya kepedulian kepala keluarga terhadap asupan gizi Balita. <input type="checkbox"/> Kurangnya perhatian aparat setempat terhadap status gizi warganya.
		Belum optimalnya Imunisasi	<input type="checkbox"/> Rendahnya cakupan kelurahan UCI ( <i>universal child immunization</i> )
		Munculnya Penyakit Difteri	<input type="checkbox"/> Rendahnya pengawasan terhadap status imunisasi pada anak. <input type="checkbox"/> Kurangnya perhatian tenaga kesehatan terhadap munculnya kembali kasus-kasus seperti Difteri.
		Belum optimalnya Manajemen perencanaan kesehatan	<input type="checkbox"/> Kurangnya dukungan sumber daya, dalam hal peningkatan data bagi manajemen perencanaan. <input type="checkbox"/> Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan baik.

	Tingginya laju pertumbuhan Penduduk	Belum adanya Blue Print/Roadmap Kependudukan.  Belum optimalnya cakupan pelayanan KB aktif	<input type="checkbox"/> Masih manualnya penanganan pengendalian penduduk, dan pelaksanaan lebih kepada menyelesaikan kegiatan tanpa arah maupun peta penyelesaian pengendalian penduduk. <input type="checkbox"/> Rendahnya motifasi penyuluh KB dalam upaya peningkatat cakupan KB Aktif
--	-------------------------------------	--	---

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Pemerintah.

Sehubungan belum adanya pimpinan daerah yang defenitif maka Dokumen Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana disusun dengan berpedoman dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya, mulai dari RPD perubahan Kota Singkawang, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

### 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan maka ditetapkan visi dan misi Kementerian Kesehatan tahun 2020 – 2024 yaitu :

#### Visi

“Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”

#### Misi

- a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Menurunkan angka stunting pada balita;
- c. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Tujuan strategis dari Kementerian Kesehatan yaitu Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta peningkatan sumber daya kesehatan.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Singkawang tahun 2021-2024, sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata yang berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa. Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*frame work of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah (PD). Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam empat tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan / atau program.

Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001. Merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang adalah hasil pemekaran Kabupaten Bengkayang, yang terletak pada

0044'55,85"-01 0 01'21,51" Lintang Utara dan 108051'47,6" -109 0 10'19" Bujur Timur di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

Secara administratif, Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Luas keseluruhan Kota Singkawang adalah 50.400 ha, dengan demikian luas Wilayah Singkawang merupakan luas wilayah yang terkecil dibandingkan dengan wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan wilayah tersebut diharapkan jangkauan penerapan program-program kesehatan seperti penerapan dan jangkauan Kota Sehat akan dapat terlaksana dengan baik.

Batas-batas wilayah administrasi Kota Singkawang sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Sambas
- Selatan : Kabupaten Bengkayang
- Timur : Kabupaten Bengkayang
- Barat : Laut Natuna.

### 3.5 Penentuan isu-usu Strategis.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan. Seperti masalah penyebaran Covid-19 yang merupakan masalah menyeluruh atau Universal yang masih perlu kewaspadaan.
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari:
  - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang 2005-2025.
  - Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, sarana prasarana pelayanan kesehatan saat ini, serta kemungkinan pengaruh lainnya.
  - Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD/Target Rencana Strategis PD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebelumnya.
3. Derajat kesehatan merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan semua bidang. Upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini telah memberikan hasil dan mampu menghadapi berbagai tantangan epidemiologi maupun manajemen. Dengan demikian, perlu diidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan upaya peningkatan derajat kesehatan.

Isu-isu tersebut dapat kami sampaikan sebagai tantangan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas Upaya Pelayanan Kesehatan pada UKP dan UKM di antaranya adalah : AKI, AKB, Status Gizi (didalamnya adanya Prevalensi Stunting);
  - b. Penanggulangan Penyakit menular: MDR TB, HIV-AIDS, Malaria, DBD, pneumonia pada balita;
  - c. Penyakit tidak menular: Metabolic Syndrome, Adiksi, Gangguan Jiwa;
  - d. Neglected Disease : Filariasis, Kusta;
  - e. Konsistensi pencapaian PD3I;
  - f. Dinamika masalah di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, terkait peningkatan mutu layanan kesehatan;
  - g. Lansia : Kualitas Hidup, Malnutrisi;
  - h. Defisiensi micronutrient pada WUS, remaja dan anak;
  - i. Arah Keberlanjutan Pembangunan Pengendalian Penduduk;
4. Faktor yang memengaruhi kesehatan, yang kemudian disebut determinan kesehatan yang lebih banyak sebagai faktor risiko bagi kesehatan. Namun demikian, pengaruhnya terhadap derajat kesehatan masyarakat sangat besar. Identifikasi isu-isu strategis tersebut sebagai berikut:
- a. Kependudukan : kenaikan jumlah, mobilitas, struktur umur, penyiapan bonus demografi.
  - b. Kemiskinan: kantong masalah kemiskinan, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan gizi anak, remaja, bumil miskin, tempat tinggal dan lingkungan penduduk miskin.
  - c. Lingkungan : Kantong masalah jamban keluarga dan air bersih, polusi udara, polusi air sungai, penumpukan plastic pada kawasan tertentu.
  - d. Perilaku : pola gaya hidup, konsumsi rokok, makanan terkontaminasi, ketahanan keluarga, kurang aktivitas fisik, kemandirian di dalam kesehatan.
  - e. Sosial Kapital (individualistik).
  - f. Disrupsi akibat perubahan teknologi.
  - g. Kemandirian personal, keluarga dalam kesehatan.
5. Sistem kesehatan merupakan determinan yang berada dalam kendali sektor kesehatan. Isu strategis sistem kesehatan berkaitan dengan pilar-pilar dan outcome dari sistem kesehatan yaitu: pelayanan kesehatan, sumberdaya

manusia, infrastruktur, sistem informasi kesehatan, pembiayaan dan *stewardship*. Isu-isu strategis tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

- a. *Overheating* sistem pelayanan kesehatan karena beban masalah kesehatan dan penekanan pada kuratif serta inovasi bidang kesehatan.
- b. *Trade off* sumberdaya karena beban masalah kesehatan dan penekanan pada kuratif serta inovasi bidang kesehatan.
- c. Penguatan fungsi *stewardship*: regulasi, tatakelola, monitoring kesehatan, surveilans, agar sistem pelayanan kesehatan berjalan baik dan faktor risiko terkendali.
- d. Konsistensi pembiayaan kesehatan secara proporsional, mobilisasi dana.
- e. Kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.
- f. *Engagement* Swasta dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Singkawang.
- g. Sosialisasi Universal Health Coverage yang Simultan di tingkat Kota Singkawang.
- h. Kualitas Pelayanan Kesehatan termasuk SDM, infrastruktur pelayanan dan penunjang pelayanan.
- i. *Inclusiveness* pada masyarakat/warga tertentu.
- j. Stagnannya upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kesehatan.
- k. Tata Kelola sistem pelayanan kesehatan di pelayanan primer maupun sekunder.
- l. Teknologi komunikasi dan informasi : sistem pelaporan pemerintah-swasta.

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Singkawang, dengan metode jaminan kesehatan secara *Universal Health Coverage* maka diharapkan pelayanan kesehatan secara *Continuum of Care* (dari lahir hingga lansia).

Kasus kematian ibu dan bayi masih saja menjadi trending topik disetiap membicarakan persoalan status kesehatan masyarakat disamping angka prevalensi stunting yang terus naik berdasarkan data SSGI maupun data EPPBGM, tetapi penyakit orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang

dengan masalah kejiwaan (ODMK) tidak kalah penting dan cenderung meningkat. Selain penyakit menular terjadi fenomena meningkatnya penyakit tidak menular, dan secara bersamaan terjadi pula masalah gizi buruk dan masih banyak dijumpai pula penderita Obesitas meningkat, dan penyakit penyerta lainnya karena kurangnya keikutsertaan dalam program vaksinasi yang lengkap, sehingga muncul apa yang dinamakan (*the triple burden of diseases*).

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program dengan berbagai upaya yang berkesinambungan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang salah satunya diukur secara makro yaitu Peningkatan Angka Umur Harapan Hidup dan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Singkawang menjadi tujuan yang harus ditekankan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang merupakan bagian dalam RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005 – 2025.

Sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari RPJPD Kota Singkawang yang masuk pada masa akhir dari RPJPD dengan visi “Singkawang Maju, Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri”. Dalam mendukung visi Singkawang maju, sejahtera, dan berbasis jasa, maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana menetapkan 7 sasaran strategis Kesehatan dan 1 saasaran strategis Pengendalian Penduduk 4 tahun kedepan diantaranya :

1. Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
2. Tersedianya Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan manajemen Sediaan Farmasi, makanan dan minuman sesuai standar.
3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar.
4. Terpenuhinya UKBM yang mengalami pengembangan dan peningkatan.
5. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Kesehatan yang Berorientasi pada Reformasi Birokrasi.
6. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur
7. Meningkatnya jumlah akseptor KB.
8. Meningkatnya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Tujuan dan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran Jangka menengah yang akan dicapai, oleh Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Singkawang seperti diuraikan pada tabel T-C 2.5 sebagai berikut:

**Tabel T-C 2.5**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga**  
**Berencana Kota Singkawang**

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Umur Harapan Hidup	1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup			UHH = 72.56	UHH = 72,66	UHH = 76.76	UHH = 72,86
			1. Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.	Persentase dari SPM Bidang Kesehatan.	100%	100%	100%	100%
			2. Tersedianya Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan manajemen Sediaan Farmasi, makanan dan minuman sesuai standar.	Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan Manajemen Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar.	85%	90%	90%	95%
			3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar.	100%	100%	100%	100%
			4. Terpenuhinya UKBM yang mengalami pengembangan dan peningkatan.	Persentase UKBM yang mengalami pengembangan dan peningkatan Penilaian PNPRB mencapai nilai yang meningkat.	85 %	85 %	85 %	85 %
			5. Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Kesehatan yang Berorientasi pada Reformasi Birokrasi.	Kategori Penilaian RB	BB	BB	A-	A-
2.	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk			LPP= 1.65	LPP= 1.62	LPP= 1.59	LPP= 1.56
			6. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur.	Angka kelahiran menurut kelompok umur /TFR	2.03	2.02	2.0	1.9
			7. Meningkatnya jumlah akseptor KB	Rasio Jumlah Akseptor KB	85 %	90 %	100 %	100 %
			8. Meningkatnya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Persentase Peningkatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PKS)	80%	5%	85%	85%

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

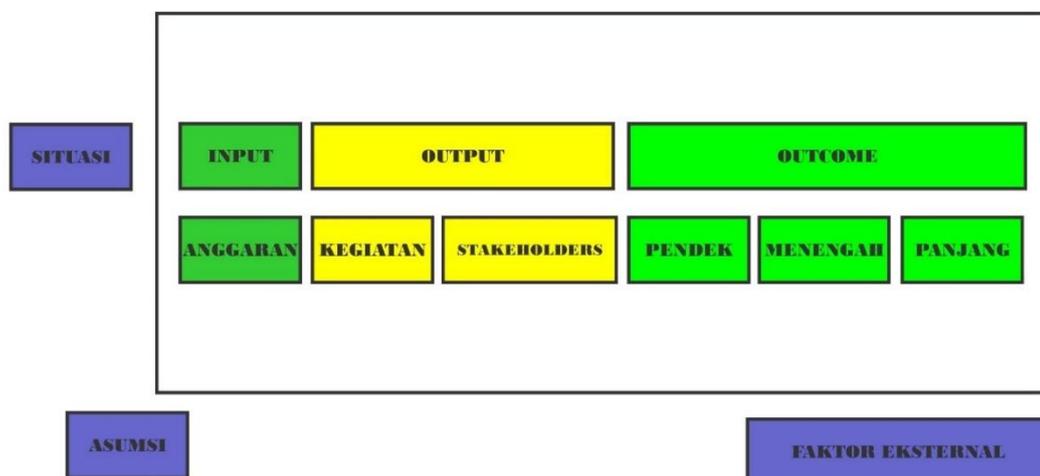
Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis Pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang tahun 2023-2026 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika. *Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak. *Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Singkawang.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

**GAMBAR  
LOGIC MODEL**



Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Singkawang dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan. perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *Logic Model*.

Untuk mendukung visi dan misi RPJPD kota Singkawang dalam mengarahkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mewujudkannya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

**Tabel T-C 26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Pemerintah Kota Singkawang**

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Umur Harapan Hidup	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.	1	Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Lanjutan	Peningkatan akreditasi dan standarisasi pelayanan kesehatan dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu di fasilitas pelayanan primer dan lanjutan.
		2	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Kesehatan primer dan lanjutan	
	Tersedianya Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan manajemen Sediaan Farmasi, makanan dan minuman sesuai standar	1	Peningkatan cakupan imunisasi pada ibu yang beresiko dan anggota keluarga lainnya	Peningkatan Capaian SPM bidang Kesehatan Masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan.
		2	Peningkatan Jumlah kunjungan ANC pada ibu hamil.	
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3	Pemenuhan alat diagnostic guna mendukung pemeriksaan ibu hamil.	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat lainnya sesuai standar.
Terpenuhinya UKBM yang mengalami pengembangan dan peningkatan.		1	Peningkatan pemeriksaan kesehatan pada kelompok masyarakat rentan penyakit menular dan tidak menular.	Peningkatan Capaian SPM bidang Penanggulangan Penyakit sesuai target yang telah ditetapkan.
		2	Peningkatan upaya perbaikan sanitasi di wilayah-wilayah yang rentan terhadap penyebaran penyakit menular akibat lingkungan.	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular lainnya.
		3	Memperkuat upaya <i>Surveillance</i> dan epidemiologi	
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Kesehatan yang Berorientasi pada Reformasi Birokrasi.		1	Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat dan Vaksin.	Ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan dalam kemandirian, keamanan dan mutu serta manfaat dari obat, vaksin, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.
		2	Terwujudnya Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan:	

		3	Terjaminnya Keamanan, Mutu dan Manfaat Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan.	
		1	Terwujudnya Indeks persepsi korupsi yang rendah pada semua aparat kesehatan	Peningkatan penilaian PMPRB di Dinas Kesehatan dan jaringannya.
		2	Terwujudnya kemudahan berusaha di sector kesehatan	
		3	Terjaminnya instansi Dinas kesehatan dan jaringannya memiliki akuntabilitas yang tinggi	
		1	Terwujudnya gerakan masyarakat yang bersuberdaya masyarakat di sector kesehatan	Peningkatan peran masyarakat pada sektor Kesehatan.
		1	Terwujudnya data laporan tahunan capaian indikator yang tertuang dalam RENSTRA 2023-2026, dan Renja Dinkes & KB tahun berjalan	Peningkatan akurasi data yang tersaji dalam bentuk Profil Kesehatan.
Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur	1	Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang	Melakukan upaya pengendalian penduduk dan pelaksanaan penerapan KB (Keluarga Berencana)
	Meningkatnya jumlah akseptor KB	2	Peningkatan keikutsertaan Keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Melakukan upaya pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Meningkatnya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3	Peningkatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Melakukan Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, yang berkaitan dengan program menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan pengaruhnya sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Dinas Kesehatan dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 2023-2026 secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah pemerintah kota maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan

tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam penyusunan Renstra, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,

yang bersumber dari APBD Kota Singkawang, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 2023-2026 Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel T-C 27 berikut ini :

**Tabel T-C 27**  
**Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**  
**Kota Singkawang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan						230,801,130,393		249,870,733,191		250,554,111,220		275,130,238,758		1,391,238,453,950	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
				Meningkatnya Usia Harapan Hidup	72.46	72.56	225,009,544,893	72.66	246,388,416,536	76.76	247,055,611,220	72.86	271,175,365,464	72.86	1,374,511,178,501	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan masyarakat	85.00	80%	32,202,284,225	80%	50,393,541,441	85%	50,791,900,229	85%	58,584,280,000	96.25	191,972,005,895	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan alat dan sarana prasarana kesehatan	80%	80%	8,087,761,375	80%	16,782,307,761	85%	16,512,307,761	85%	19,431,000,000	85%	60,813,376,897	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.01.0002	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		unit		1 unit	1,500,000,000	1 unit	750,000,000	1 unit	1,750,000,000	1 unit	4,000,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 unit	2 unit	3,000,000,000	2 unit	8,500,000,000	2 unit	8,500,000,000	2 unit	9,800,000,000	2 unit	29,800,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 unit	4 unit	450,000,000	4 unit	600,000,000	4 unit	650,000,000	4 unit	700,000,000	4 unit	2,400,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		2 unit	200,000,000	2 unit	225,000,000	2 unit	450,000,000	2 unit	300,000,000	2 unit	1,175,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.01.0004	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100%	250 unit	3,875,391,375	166 unit	1,842,307,761	166 unit	2,042,307,761	166 unit	2,120,000,000	166 unit	9,880,006,897	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	na			1 paket	3,800,000,000	1 paket	3,800,000,000	1 paket	4,391,000,000	1 paket	11,991,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	umlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100%	150 unit	400,000,000	50 unit	300,000,000	50 unit	300,000,000	50 unit	350,000,000	50 unit	1,350,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		125 keluarga	162,370,000	125 keluarga	15,000,000	125 keluarga	20,000,000	125 keluarga	20,000,000	125 keluarga	217,370,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan pelayanan kesehatan pada UKM dan UKP rujukan tingkat Kota	85%	100%	23,957,522,850	100%	33,493,233,680	100%	34,131,592,468	100%	38,989,300,000	100%	130,571,648,998	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79.65%	4527 orang	349,000,000	4527 orang	344,671,000	4,527 orang	344,671,000	4,527 orang	390,000,000	4,527 orang	1,428,342,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76.04%	4321 orang	415,000,000	4321 orang	191,550,000	4,321 orang	191,550,000	4,321 orang	225,000,000	4,321 orang	1,023,100,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75.56%	4115 orang	290,000,000	4115 orang	337,200,000	4,115 orang	337,200,000	4,115 orang	390,000,000	4,115 orang	1,354,400,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37.75%	19792 orang	475,000,000	19792 orang	287,800,000	19,792 orang	287,800,000	19,792 orang	330,000,000	19,792 orang	1,380,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48.56%	35794 orang	485,000,000	35794 orang	314,250,000	35,794 orang	314,250,000	35,794 orang	360,000,000	35,794 orang	1,473,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.65%	148497 orang	370,200,000	148497 orang	330,730,000	148,497 orang	342,000,000	148,497 orang	390,000,000	148,497 orang	1,432,930,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40.88%	28879 orang	395,000,000	28879 orang	284,500,000	28,879 orang	284,500,000	28,879 orang	330,000,000	28,879 orang	1,294,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30.71%	76165 orang	170,200,000	76165 orang	30,000,000	76,165 orang	33,000,000	76,165 orang	35,000,000	76,165 orang	268,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	69.68%	6297 orang	375,200,000	6297 orang	30,000,000	6,297 orang	33,000,000	6,297 orang	35,000,000	6,297 orang	473,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	67.18%	496 orang	292,400,000	496 orang	76,540,000	496 orang	82,000,000	496 orang	88,000,000	496 orang	538,940,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	93.52%	5494 orang	679,830,000	5494 orang	241,547,880	5,494 orang	255,712,668	5,494 orang	280,000,000	5,494 orang	1,457,090,548	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	79.94%	6603 orang	141,200,000	6603 orang	164,000,000	6,603 orang	179,500,000	6,603 orang	190,000,000	6,603 orang	674,700,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang

		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100%	1 dokumen	409,685,300	1 dokumen	75,000,000	1 dokumen	85,000,000	1 dokumen	90,000,000	1 dokumen	659,685,300	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		1 dokumen		1 dokumen	1,200,000	1 dokumen	1,200,000	1 dokumen	1,400,000	1 dokumen	3,800,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	1 dokumen	1,215,000,000	1 dokumen	1,733,800,000	1 dokumen	2,000,000,000	1 dokumen	2,100,000,000	1 dokumen	7,048,800,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100%	dokumen		1 dokumen	1,200,000	1 dokumen	1,200,000	1 dokumen	1,400,000	1 dokumen	3,800,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	5 dokumen	153,634,200	5 dokumen	330,000,000	5 dokumen	350,000,000	5 dokumen	380,000,000	5 dokumen	1,213,634,200	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5	5 dokumen	30,000,000	5 dokumen	50,000,000	5 dokumen	100,000,000	5 dokumen	60,000,000	5 dokumen	240,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5	5 dokumen	65,091,200	5 dokumen	407,900,000	5 dokumen	407,900,000	5 dokumen	472,000,000	5 dokumen	1,352,891,200	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	10 dokumen	268,032,900	10 dokumen	497,300,000	10 dokumen	553,500,000	10 dokumen	575,000,000	10 dokumen	1,893,832,900	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	2 dokumen	2,340,000,000	2 dokumen	25,375,136,800	2 dokumen	26,000,000,000	2 dokumen	29,500,000,000	2 dokumen	83,215,136,800	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah		orang		1 orang	1,200,000	1 orang	1,200,000	1 orang	1,400,000	1 orang	3,800,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100%	paket		1 paket	47,000,000	1 paket	55,000,000	1 paket	55,000,000	1 paket	157,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		1 dokumen	84,800,000	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,200,000	1 dokumen	88,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		10 unit	50,000,000	10 unit	10,000,000	10 unit	15,000,000	10 unit	15,500,000	10 unit	90,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	10 dokumen	14,603,249,250	10 dokumen	1,000,000,000	10 dokumen	1,000,000,000	10 dokumen	1,155,000,000	10 dokumen	17,758,249,250	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		9 unit	300,000,000	9 unit	600,000,000	9 unit	100,000,000	9 unit	690,000,000	9 unit	1,690,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		unit		10 unit	250,000,000	10 unit	250,000,000	10 unit	288,900,000	10 unit	788,900,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		orang		1018 orang	201,163,000	1,018 orang	213,509,300	1,018 orang	232,500,000	1,018 orang	647,172,300	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		orang		390 orang	65,000,000	390 orang	70,000,000	390 orang	75,000,000	390 orang	210,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria sesuai standar		orang		100 orang	113,545,000	100 orang	121,899,500	100 orang	132,000,000	100 orang	367,444,500	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok		tatanan		2 tatanan	100,000,000	2 tatanan	120,000,000	2 tatanan	120,000,000	2 tatanan	340,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	85%	85%	25,000,000	100%	56,000,000	100%	86,000,000	100%	92,000,000	100%	259,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		11 dokumen	25,000,000	11 dokumen	56,000,000	11 dokumen	86,000,000	11 dokumen	92,000,000	11 dokumen	259,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pengawasan penerbitan izin RS kelas C, D dan fasilitas kesehatan Tingkat Daerah Kota Singkawang	90%	90%	132,000,000	100%	62,000,000	100%	62,000,000	100%	71,980,000	100%	327,980,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100%	31 unit	32,000,000	31 unit	32,000,000	31 unit	32,000,000	31 unit	36,980,000	31 unit	132,980,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		10 unit	100,000,000	10 unit	30,000,000	10 unit	30,000,000	10 unit	35,000,000	10 unit	195,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	100%	860,000,000	100%	901,000,000	100%	965,000,000	100%	1,048,000,000	100%	3,774,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan SDM di Fasilitas Pelayanan Kota Singkawang	100%	100%	460,000,000	100%	51,000,000	100%	65,000,000	100%	68,000,000	100%	644,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	2 dokumen	120,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	55,000,000	2 dokumen	58,000,000	2 dokumen	283,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		2 orang	340,000,000	2 orang	1,000,000	2 orang	10,000,000	2 orang	10,000,000	2 orang	361,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang

	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Singkawang	100%	100%	400,000,000	100%	850,000,000	100%	900,000,000	100%	980,000,000	100%	3,130,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100%	100 orang	400,000,000	100 orang	850,000,000	100 orang	900,000,000	100 orang	980,000,000	100 orang	3,130,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan Manajemen sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar	100%	85.00%	64,805,900	90%	449,445,000	90%	454,445,000	95%	524,300,000	95%	1,492,995,900	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT sesuai standar perizinan dalam setahun	90%	90%	20,000,000	90%	78,445,000	95%	78,445,000	95%	92,300,000	95%	269,190,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	78,445,000	2 dokumen	78,445,000	2 dokumen	92,300,000	2 dokumen	269,190,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sesuai standar dalam 1 tahun	100%	100%	20,000,000	100%	140,000,000	100%	140,000,000	100%	160,000,000	100%	460,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor PIRT sebagai izin produksi, untuk produksi makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga.	100%	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	140,000,000	2 dokumen	140,000,000	2 dokumen	160,000,000	2 dokumen	460,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM) di Kota Singkawang	100%	100%	9,805,900	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	60,000,000	100%	174,805,900	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	1 dokumen	9,805,900	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	55,000,000	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	174,805,900	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga di Kota Singkawang.	100%	100%	15,000,000	100%	181,000,000	100%	181,000,000	100%	212,000,000	100%	589,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		90 unit	15,000,000	90 unit	181,000,000	90 unit	181,000,000	90 unit	212,000,000	90 unit	589,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota Singkawang	80%	80%	424,106,800	80%	866,219,600	85%	915,457,600	85%	1,002,000,000	85%	3,207,784,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan publik berwawasan Kesehatan	80%	80%	152,236,800	80%	114,457,600	85%	114,457,600	90%	132,000,000	90%	513,152,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		2 dokumen	152,236,800	2 dokumen	114,457,600	2 dokumen	114,457,600	2 dokumen	132,000,000	2 dokumen	513,152,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Persentase Rumah Sehat	85%	85%	217,630,000	85%	1,000,000	90%	1,000,000	95%	2,000,000	95%	221,630,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1 dokumen	217,630,000	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	1,000,000	1 dokumen	2,000,000	1 dokumen	221,630,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	85%	85%	54,240,000	85%	750,762,000	90%	800,000,000	95%	868,000,000	95%	2,473,002,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	2 dokumen	54,240,000	2 dokumen	750,762,000	2 dokumen	800,000,000	2 dokumen	868,000,000	2 dokumen	2,473,002,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam 1 Tahun	100%	100%	191,458,347,968	100%	193,778,210,495	100%	193,928,808,391	100%	210,016,785,464	100%	1,174,064,392,706	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4 dok	57,997,850	4 dok	63,000,000	4 dok	65,000,000	4 dok	74,000,000	4 dok	259,997,850	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	6 dokumen	18,000,000	6 dokumen	18,000,000	6 dokumen	18,000,000	6 dokumen	21,000,000	6 dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	2 laporan	18,000,000	2 laporan	63,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang

		1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	4 laporan	24,997,850	4 laporan	30,000,000	4 laporan	32,000,000	4 laporan	35,000,000	4 laporan	121,997,850	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	82,349,322,871	100%	82,349,322,871	100%	82,349,322,871	100%	95,164,985,464	100%	342,212,954,077	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	912 orang/bulan	81,940,668,871	912 orang/bulan	81,940,668,871	912 orang/bulan	81,940,668,871	912 orang/bulan	94,692,685,464	912 orang/bulan	340,514,692,077	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1 dokumen	343,654,000	1 dokumen	343,654,000	1 dokumen	343,654,000	1 dokumen	397,000,000	1 dokumen	1,427,962,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	550 dokumen	45,000,000	550 dokumen	45,000,000	550 dokumen	45,000,000	550 dokumen	52,000,000	550 dokumen	187,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1 laporan	5,000,000	1 laporan	5,000,000	1 laporan	5,000,000	1 laporan	5,800,000	1 laporan	20,800,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	17,500,000	3 dokumen	62,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%	17,500,000	100%	17,500,000	100%	17,500,000	100%	20,500,000	100%	73,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	6,000,000	1 dokumen	21,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	6 laporan	7,500,000	6 laporan	7,500,000	6 laporan	7,500,000	6 laporan	8,500,000	6 laporan	31,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	6,000,000	1 dokumen	21,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	100,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang						
		1.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang						
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	125,700,000	100%	250,700,000	100%	225,700,000	100%	318,500,000	100%	920,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	100 dokumen	43,900,000	100 dokumen	43,900,000	100 dokumen	43,900,000	100 dokumen	51,000,000	100 dokumen	182,700,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	100 dokumen	81,800,000	100 dokumen	81,800,000	100 dokumen	81,800,000	100 dokumen	94,500,000	100 dokumen	339,900,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		orang		200 orang	125,000,000	200 orang	100,000,000	200 orang	173,000,000	200 orang	398,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	327,000,000	100%	633,000,000	100%	708,000,000	100%	788,800,000	100%	2,456,800,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1 paket	7,000,000	1 paket	7,000,000	1 paket	7,000,000	1 paket	8,000,000	1 paket	29,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 paket	19,000,000	1 paket	400,000,000	1 paket	400,000,000	1 paket	450,000,000	1 paket	1,269,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	12 paket	10,000,000	12 paket	10,000,000	12 paket	10,000,000	12 paket	12,000,000	12 paket	42,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		24 paket	10,000,000	24 paket	10,000,000	24 paket	10,000,000	24 paket	12,000,000	24 paket	42,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	12 paket	4,000,000	12 paket	4,000,000	12 paket	4,000,000	12 paket	4,500,000	12 paket	16,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,000,000	2 dokumen	2,300,000	2 dokumen	8,300,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100 laporan	275,000,000	100 laporan	200,000,000	100 laporan	275,000,000	100 laporan	300,000,000	100 laporan	1,050,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,300,000,000	100%	3,700,000,000		
		1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 unit	1,200,000,000	2 unit	1,200,000,000	2 unit	1,300,000,000	2 unit	3,700,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	7,241,962,454	100%	6,691,962,454	100%	6,968,285,520	100%	7,730,000,000	100%	28,632,210,428	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	13 laporan	4,273,676,934	13 laporan	3,723,676,934	13 laporan	4,000,000,000	13 laporan	4,300,000,000	13 laporan	16,297,353,868	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100 laporan	2,968,285,520	100 laporan	2,968,285,520	100 laporan	2,968,285,520	100 laporan	3,430,000,000	100 laporan	12,334,856,560	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	213,952,863	100%	947,725,170	100%	770,000,000	100%	895,000,000	100%	2,826,678,033	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	28 unit	125,000,000	28 unit	127,725,170	28 unit	150,000,000	28 unit	150,000,000	28 unit	552,725,170	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		20 unit	20,000,000	20 unit	20,000,000	20 unit	20,000,000	20 unit	25,000,000	20 unit	85,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	10 unit	50,000,000	10 unit	50,000,000	10 unit	50,000,000	10 unit	60,000,000	10 unit	210,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang

		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit		1 unit	50,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	60,000,000	1 unit	160,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	1 unit	18,952,863	1 unit	200,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	300,000,000	1 unit	768,952,863	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		1 unit	500,000,000	1 unit	250,000,000	1 unit	300,000,000	1 unit	1,050,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	100%	101,099,911,930	100%	102,800,000,000	100%	102,800,000,000	100%	105,000,000,000	100%	411,699,911,930	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	11 Unit Kerja	101,099,911,930	11 Unit Kerja	102,800,000,000	11 Unit Kerja	102,800,000,000	11 Unit Kerja	105,000,000,000	11 Unit Kerja	411,699,911,930	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk			Menurunnya Angka TFR	1.55%	2.57%	5,791,585,500	2.56%	3,482,316,655	2.55%	3,498,500,000	2.54%	3,954,873,294	2.54%	16,727,275,449	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate) Kota Singkawang < 2%		80	307,600,000	85%	197,600,000	90%	197,600,000	95%	230,000,000	100%	932,800,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	n/a	80%	175,000,000	85%	65,000,000	90%	65,000,000	95%	75,000,000	100%	380,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	280,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.02.2.01.0005	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		7 dokumen	25,000,000	7 dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang						
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	80%	132,600,000	85%	132,600,000	90%	132,600,000	95%	155,000,000	100%	552,800,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	5 laporan	38,400,000	5 laporan	38,400,000	5 laporan	38,400,000	5 laporan	45,000,000	5 laporan	160,200,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100	5 laporan	94,200,000	5 laporan	94,200,000	5 laporan	94,200,000	5 laporan	110,000,000	5 laporan	392,600,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pembinaan Program Keluarga Berencana (KB)	80%	80%	4,055,185,500	80%	2,417,116,655	90%	2,433,300,000	100%	2,718,291,294	100%	11,623,893,449	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	80%	1,683,110,900	85%	645,736,655	90%	660,000,000	95%	735,000,000	95%	3,723,847,555	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		5 organisasi	120,000,000	5 organisasi	120,000,000	5 organisasi	120,000,000	5 organisasi	140,000,000	5 organisasi	500,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		5 unit	1,177,361,000	5 unit	139,986,755	5 unit	150,000,000	5 unit	160,000,000	5 unit	1,627,347,755	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100%	5 laporan	65,000,000	5 laporan	65,000,000	5 laporan	65,000,000	5 laporan	75,000,000	5 laporan	270,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100%	5 laporan	240,749,900	5 laporan	240,749,900	5 laporan	245,000,000	5 laporan	270,000,000	5 laporan	996,499,800	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	100%	5 laporan	80,000,000	5 laporan	80,000,000	5 laporan	80,000,000	5 laporan	90,000,000	5 laporan	330,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	80%	79,430,000	85%	79,430,000	90%	80,000,000	95%	91,791,294	95%	330,651,294	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%	26 orang	79,430,000	26 orang	79,430,000	26 orang	80,000,000	26 orang	90,000,000	26 orang	328,860,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	80%	2,031,144,600	85%	1,430,450,000	90%	1,431,800,000	95%	1,586,500,000	95%	6,479,894,600	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	36 laporan	31,800,600	36 laporan	31,800,000	36 laporan	31,800,000	36 laporan	36,500,000	36 laporan	131,900,600	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100%	5 orang	398,650,000	5 orang	398,650,000	5 orang	400,000,000	5 orang	450,000,000	5 orang	1,647,300,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		50 unit	1,600,694,000	50 unit	1,000,000,000	50 unit	1,000,000,000	50 unit	1,100,000,000	50 unit	4,700,694,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	80%	261,500,000	85%	261,500,000	90%	261,500,000	95%	305,000,000	95%	1,089,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	100%	5 dokumen	184000000	5 dokumen	184,000,000	5 dokumen	184,000,000	5 dokumen	215,000,000	5 dokumen	767,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang

		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100%	5 kampung	77500000	5 kampung	77,500,000	5 kampung	77,500,000	5 kampung	90,000,000	5 kampung	322,500,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	74%	80%	1,428,800,000	80%	867,600,000	85%	867,600,000	85%	1,006,582,000	95%	4,170,582,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	74%	80%	1,428,800,000	85%	867,600,000	90%	867,600,000	95%	1,006,582,000	95%	4,170,582,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		3 unit	360,000,000	3 unit	360,000,000	3 unit	360,000,000	3 unit	420,000,000	3 unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	74%	4705 orang	1,040,000,000	4705 orang	478,800,000	4,705 orang	478,800,000	4,705 orang	553,300,000	4,705 orang	2,550,900,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang
		2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		1 kelompok	28,800,000	1 kelompok	28,800,000	1 kelompok	28,800,000	1 kelompok	33,282,000	1 kelompok	119,682,000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kota Singkawang

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 - 2026.

**Tabel T-C 28**

**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPD	Target Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pemenuhan alat dan sarana prasarana kesehatan.	N/A	80%	80%	85%	85%	85%
2.	Persentase indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan pelayanan kesehatan pada UKM dan UKP rujukan tingkat Kota.	N/A	85%	85%	85%	85%	85%
3.	Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	75.74%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Cakupan ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	72.35%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Cakupan bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	75.17%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Cakupan balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	27.68%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Cakupan usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	42.04%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar.	42.05%	100%	100%	100%	100%	100%

9.	Cakupan usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	31.65%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	13.39%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Cakupan penderita diabetes mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	62.10%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	58.97%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Cakupan orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar.	93.52%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC	90%	90%	90%	90%	90%	90%
15.	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	90%	90%	90%	90%	90%	90%
16.	Cakupan orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai standar.	79.94%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	Persentase ODHA mendapat ART	90%	90%	90%	90%	90%	90%
18.	Persentase ODHA ARV dengan Viral Load tersupresi	90%	90%	90%	90%	90%	90%
19.	Persentase pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi.	N/A	80%	85%	90%	90%	90%
20.	Persentase pengendalian dan pengawasan penerbitan izin RS kelas C,D dan fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kota Singkawang	N/A	90%	90%	90%	90%	90%
21.	Persentase penyediaan SDM di Fasilitas Pelayanan Kota Singkawang	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
22.	Persentase pelaksanaan pengembangan Mutu dan Peningkatan Kopetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Singkawang	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Persentase pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT sesuai standar perizinan dalam setahun	N/A	85%	90%	90%	95%	95%

24.	Persentase pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sesuai standar dalam 1 tahun	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
25.	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM) di Kota Singkawang	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
26.	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga di Kota Singkawang.	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
27.	Penilaian PNPRB.	N/A	BB	BB	A-	A-	A-
28.	Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan	N/A	80%	80%	80%	80%	80%
29.	Persentase Rumah Sehat.	N/A	85%	85%	85%	85%	85%
30.	Persentase Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	N/A	85%	85%	85%	85%	85%
31.	Persentase balita gizi kurang (BB/TB)	4,40%	4,40%	4,30%	4,20%	4,10%	4,10%
32.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33.	Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif.	50%	50%	55%	60%	65%	65%
34.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan surveilens gizi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35.	Persentase balita stunting	11,33%	12%	11,50%	11,50%	11,00%	10,50%
36.	Persentase Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan.	20%	70%	90%	95%	100%	100%
37.	Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minum sesuai standar.	68%	72%	76%	80%	85%	85%

38.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS,Klinik, PKM) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar.	68%	72%	76%	80%	85%	85%
39.	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan	50	56	62	74	80	80
40.	Persentase tempat dan fasilitas umum (tfu) yang melakukan pengawasan sesuai standar.	65	70	75	80	85	85
41.	Penemuan Kasus Non Polio AFP pada penduduk usia < 15 tahun.	3 Kasus					
42.	Penemuan kasus Discarded campak	10	10	10	10	10	10
43.	Persentase Kejadian Luar Biasayang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
44.	Persentase bayi usia 0 - 11 Bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap.	90%	93%	95%	100%	100%	100%
45.	Persentase bayi usia 0 - 11 Bulan yang mendapatkan Antigen Baru	90%	93%	95%	100%	100%	100%
46.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12 - 23 Bulan.	71%	75%	80%	85%	90%	90%
47.	Persentase anak usia 12 - 24 Bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan /Baduta.	90%	93%	95%	100%	100%	100%
48.	Persentase anak yangnmendapatkan imunisasi lanjutan Lengkap di Usia Sekolah Dasar	70%	75%	80%	85%	90%	90%
49.	Presentase Wanita Usia Subur yang memiliki status Imunisasi TT2+ WUS	60%	70%	80%	90%	100%	100%
50.	Persentasepembinaan masa keberangkatan jamaah haji	100%	100%	100%	100%	100%	100%
51.	Angka kesakitan (Incidence Rate atau Annual Parasite Incidence/API) Malaria per 1.000 penduduk	<1	<1	<1	<1	<1	<1

52.	Angka kesakitan (Incidence Rate = IR) DBD per 100.000 penduduk.	<49	<49	<49	<49	<49	<49
53.	Persentase penemuan pneumonia pada balita berdasarkan perkiraan kasus (incidence rate) pneumonia pada balita.	70%	75%	80%	85%	90%	90%
54.	Persentase penemuan penderita diare dari perkiraan kasus (incidence rate) penyakit diare.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55.	Persentase deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
56.	Persentase penemuan kasus baru Kusta dari perkiraan kasus (incidence rate).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
57.	Persentase Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) yang berindikasi mendapat Vaksin Anti Rabies (VAR).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
58.	Persentase jumlah penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM prioritas	45%	70%	90%	90%	90%	90%
59.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pengendalian Terpadu PTM (Pandu PTM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
60.	Persentase populasi penduduk wanita kelompok usia 30 – 50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim.	80%	80%	80%	80%	80%	80%
61.	Persentase kelurahan yang menerapkan kawasan tanpa rokok pada 7 tatanan KTR.	3/26 (11,5)	5/26 (19,2)	7/26 (26,9)	9/26 (34,6)	13/26 (50)	13/26 (50)
62.	Persentase Puskesmas menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM).	10%	20%	30%	40%	50%	50%
63.	Persentase kelurahan melaksanakan deteksi dini gangguan indera	40%	40%	50%	60%	60%	60%

64.	Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	43%	63%	90%	90%	90%	90%
65.	Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP	36%	58%	90%	90%	90%	90%
66.	Persentase jumlah penduduk usia lebih dari 15 tahun dengan resiko masalah kesehatan jiwa yang diSkruining	30%	60%	90%	90%	90%	90%
67.	TFR (Total Fertility Rate) Kota Singkawang < 2%.	N/A	2,57	2,56	2,55	2,54	2,54
68.	Persentase Pembinaan Program Keluarga Berencana (KB)	N/A	80%	85%	90%	100%	100%
69.	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	N/A	80%	85%	90%	100%	100%

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta UPT-nya dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan kesehatan selama empat tahun kedepan, berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan Indikator Kinerja, sebanyak 69 Indikator. Keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, tergantung pada faktor-faktor keberhasilan dan dukungan aparatur, praktisi, maupun partisipasi seluruh komponen masyarakat, sektor swasta dan lembaga pemerintah lain. Peranan sektor lain mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunannya juga menjadi modal dasar bagi terwujudnya pencapaian kinerja yang ditetapkan.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tahun 2023-2026, dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan, menuju terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya khususnya di Kota Singkawang. Akhir kata selamat bekerja dan mewujudkan cita-cita pemikir dan filosofi “*Health For All*”. Bahwa kesehatan itu untuk semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, dan berbagai kepentingan.



Singkawang, 24 Juni 2023  
Kepala Dinas,

Dr. Alexander, Sp.PD  
Pembina TK I  
NIP. 19711219 200502 1 003